

# Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural

**Imron Rosyadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: imron.ums@ac.id

---

## Abstrak

**Keywords:**  
*Poverty, education,  
capital,  
entrepreneurial skills*

*This study aims to identify factors causing structural poverty in the research area. Villagers left behind in Sukoharjo District are set up as research populations. While selected as a sample is the villagers left behind in the District Weru, namely the village Weru, Tegalsari, Alasombo, Karangmojo and Karakan. Each village is represented by five heads of households, bringing the total sample to 100 households. Data needed to achieve the purpose of this study is the primary data obtained by the method of observation and interview in depth. Analysis of this research data using logistic regression, because considering dependent variable using category scale, that is not poor given code 1, and poor is coded 0. The result of this result show that education of KRT, access to capital, entrepreneur skill, profit sharing system, ownership of land area a positive and significant impact on poverty. While the presence of agricultural technology has no significant effect on poverty*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 mengklaim telah berhasil memajukan sektor ekonomi, beberapa pencapaian ekonomi dan keuangan dijadikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu : (i) bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik; (ii) pendapatan per-kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per-tahun; (iii) ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, non-migas 115,9 miliar dolar; (iv) dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar; (v) rupiah menguat pada sekitar Rp.12.000 per dolar; (vi) jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta jiwa; (vii) pertumbuhan ekonomi 5,1 persen dan (viii) penjualan mobil tembus 700.000 unit (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 2016).

Pertanyaan krusial-nya adalah apakah indikator-indikator kemajuan ekonomi makro tersebut mencerminkan kualitas pembangunan

ekonomi yang sesungguhnya? atau apakah pencapaian tersebut berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata? Secara empiris, sudah banyak bukti bahwa tinggi-nya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkat-nya kesejahteraan rakyat, bahkan berdampak serius pada semakin lebar-nya *gap* antara golongan *the have* dan *the haven't*. Kesenjangan ekonomi ini bisa dicermati, misalnya pada data statistik ekonomi tahun 2015, yang menunjukkan bahwa 40 persen kelompok termiskin masyarakat Indonesia hanya bisa menikmati *share* pertumbuhan ekonomi sebesar 19,2 persen, sementara 20 persen kelompok terkaya menikmati 45,72 persen pertumbuhan ekonomi (BPS, 2015). Kesenjangan itu semakin nyata, jika mencermati angka gini rasio yang sempat mencapai sebesar 0,43 persen pada tahun 2015 yang lalu.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berat dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia serta tidak mudah keluar dari persoalan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara lain melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sebagainya yang menghabiskan anggaran negara mencapai Rp.17 triliun (TNP2K, 2014). Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Menurut catatan BPS (2015) angka masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2014 mencapai 10,96 persen atau 27,73 juta penduduk, sementara tahun 2015 jumlah masyarakat miskin bertambah sebesar 0,86 juta jiwa, sehingga total orang miskin sebesar 28,59 juta jiwa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa angka 28,59 juta jiwa itu tidak bisa hanya disebut 'sekedar miskin', namun 'sangat miskin' karena hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya memiliki pendapatan sekitar Rp.230.000 per-bulan.

Pada tahun 1949, populasi dunia di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Situasi berubah mulai tahun 2007, di mana masyarakat dunia lebih besar di perkotaan dan akan terus melonjak. Diestimasi pada 2016 sebanyak 9,6 miliar manusia menghirup udara perkotaan. Namun tingginya laju populasi perkotaan melebihi perdesaan diikuti dengan tingkat kemiskinan di desa yang lebih tinggi dibandingkan kota. Di Indonesia, menurut BPS (2017) kemiskinan di pulau Jawa lebih banyak di desa, misalkan Banten (kota 5,27 persen, desa 7,22 persen), Jawa Barat (kota 8,69 persen, desa 11,42 persen), Jawa Tengah (kota 12,53 persen, desa 16,05 persen), Yogyakarta (kota 13,73 persen, desa 17,62 persen), dan di Jawa Timur (kota 8,90 persen, desa 16,23 persen). Data tersebut menunjukkan penyebaran pengangguran lebih banyak di desa. Jika ditelusuri lebih jauh, masyarakat kota yang miskin merupakan

masyarakat urban yang tidak terserap persaingan di kota.

Data statistik tersebut tidak hanya membuktikan adanya ketimpangan pembangunan perkotaan-perdesaan, tapi juga mengindikasikan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mendorong tingginya migrasi masyarakat desa ke kota. Sesungguhnya, tingginya tingkat migrasi dari desa ke kota tidak hanya masalah khas Indonesia, nyaris negara-negara di seluruh dunia mengalami problem yang sama, tapi bedanya di negara-negara maju mampu mengurangi gap pembangunan desa-kota tersebut.

Di Indonesia, ada sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Dari total tersebut diperkirakan sekitar 18 persen atau 18.126 desa yang masih masuk kategori desa tertinggal, terbanyak di kawasan Indonesia timur. Disebut tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa seperti oase di padang pasir, memberikan harapan besar bagi desa bisa berkembang menyamai kota. Pada 2015 sidang paripurna DPR menyetujui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6 triliun. Adanya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan desa, diharapkan dapat mengubah profil desa yang nyaman dan mensejahterakan bagi penduduknya.

Keuntungan pertanian *on farm* belum menjanjikan, produktivitas aneka pangan melandai, diversifikasi pangan gagal, jumlah penduduk terus melonjak, sementara karena deraan kemiskinan konversi lahan pertanian berlangsung kian masif. Bukan hanya lahan, petani pun terancam punah. Menurut Sensus Pertanian 2013, selama satu dekade terakhir jumlah rumah tangga petani menurun sebesar 5 juta, dari 31,17 juta menjadi 26,13 juta.

Pertanian dijauhi karena tak menjanjikan kesejahteraan dan masa depan. Menurut BPS (20115) pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rerata Rp12,4 juta/tahun atau Rp1 juta/bulan. Pendapatan ini hanya menopang

sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang dari kegiatan di luar pertanian seperti ngojek, berdagang, dan jadi pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tidak ada lagi “masyarakat petani” yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Pertanian juga dijauhi tenaga kerja muda terdidik

Menurut Sensus Pertanian 2013, lebih sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun. Pertanian terancam gerontokrasi. Ini terjadi karena pertanian mengalami destruksi sistemis di semua lini, baik *on farm* maupun *off farm*, serta industri dan jasa pendukung. Otonomi daerah dan desentralisasi membuat Kementerian Pertanian tidak punya “tangan dan kaki” di daerah. Ditambah sikap pemerintah daerah yang tidak memandang penting pertanian membuat sektor pertanian rapuh di segala lini. Sejak 2007 Indonesia defisit perdagangan pangan. Impor pangan melesat lebih cepat ketimbang ekspor sehingga defisit cenderung melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia sebesar 4,87% per tahun tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi domestik (Khudori, 2015)

Sementara itu, dari 152 Desa di Kabupaten Sukoharjo terdapat 26 Desa tertinggal yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu: 5 desa di Kecamatan Weru; 3 Desa di Kecamatan Bulu; 2 Desa di Kecamatan Tawang Sari; 5 Desa di Kecamatan Nguter; 6 Desa di Kecamatan Bendosari dan 5 Desa di Kecamatan Polokarto (PNPM, 2008). Data-data tersebut menunjukkan adanya paradoksal bahwa predikat yang disandang Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil swasembada beras, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang tergolong tertinggal, serta jumlah penduduk miskinnya mencapai 84.050 jiwa atau sekitar 9,67 persen.

Hal itu karena Sektor manufaktur yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja tidak sejalan dengan realitas. Akibat surplus tenaga kerja, kemiskinan menumpuk di sektor pertanian.

Dari jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang, sebanyak 62,75% tinggal di desa yang sebagian besar petani. Ironisnya sebagai produsen pangan, petani menjadi kelompok paling terancam rawan pangan. Lahan pertanian kian sempit dan kelelahan (Khudori, 2015).

Sehingga dapat dirumuskan sejumlah masalah Apakah faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa di daerah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan struktural di daerah penelitian.

BPS (2017) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Merujuk konsep tersebut BPS (2017) menggunakan tiga konsep pokok. *Pertama*, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. *Kedua*, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya). *Ketiga*, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan Struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan (Soetandyo, 1995). Disebut tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya memicu, tetapi juga melestarikan kemiskinan di kehidupan masyarakat. Di sisi lain, kemiskinan kultural merupakan dampak dari adat dan budaya di suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan (Suyanto, 1995). Padahal indikator kemiskinan tersebut seharusnya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan nasib ke arah taraf kehidupan yang lebih baik.

Temuan Maipita et al., (2010) menyimpulkan bahwa transfer pendapatan dari pemerintah kepada rumah tangga pedesaan berpengaruh positif terhadap utilitas, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga. Tapi, telah ditemukan bahwa tingkat utilitas, pendapatan riil, dan pengeluaran rumah tangga perkotaan mengalami penurunan. Kebijakan transfer pendapatan menurunkan angka kemiskinan secara langsung khususnya di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dengan melihat seluruh indikator kemiskinan seperti *head count index*, *poverty depth* and *poverty severity* yang telah meningkat, terkecuali rumah tangga perkotaan.

Hasil perhitungan tingkat kemiskinan sektoral-regional menunjukkan bahwa hampir di semua daerah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil regresi model HCR tertimbang menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di tingkat nasional sangat tinggi, yakni mencapai -2,97. Hal ini berarti tiap pertumbuhan sebesar 1% di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan akan dapat mengurangi kemiskinan nasional sebesar 2,97%. Sementara itu hasil regresi model HCR sektoral menunjukkan bahwa elastisitas sektor

tersebut dalam mengurangi kemiskinan di sektor yang bersangkutan sebesar -7,34. Kedua besaran elastisitas tersebut jauh di atas besaran elastisitas sektorsektor usaha lainnya, termasuk elastisitas sektor industri pengolahan yang masing-masing sebesar -0,11 dan -1,51 (Suselo dan Tarsidin, 2008).

Temuan Rejekiningsih (2011) yang bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi kemiskinan di kota Semarang dengan pendekatan kultural, menyimpulkan bahwa: *pertama*, karakteristik masyarakat marjinal (miskin) di kota Semarang antara lain, kepala rumah tangga sebagian besar hanya mengenyam pendidikan SD dan atau hanya tamat SD, bekerja sebagai buruh dan memiliki tanggungan hidup sebanyak 3 orang per-keluarga. *Kedua*, distribusi bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin tidak merata, yaitu temuan di lapangan menunjukkan bahwa kurang lebih 36 persen warga miskin belum pernah mendapatkan bantuan selama dua tahun terakhir. *Ketiga*, meskipun dalam keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, masyarakat miskin memiliki orientasi nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakikat hidup, hakikat karya, hakikat waktu, hakikat hubungan dengan alam dan sesama manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjajanti (2011) untuk menjawab masalah penelitian: bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi (masyarakat miskin) melalui proses modal manusia dan modal fisik. Metode analisis statistik penelitian tersebut menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)-Smart Partial Least Square* dengan temuan penelitian bahwa ada dua pola cara yang berdampak pada peningkatan keberdayaan masyarakat, yaitu: *pertama*, ada dua konstruk sebagai anteseden, yaitu kemampuan pelaku pemberdayaan dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan keberdayaan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan (skill) pelaku pemberdayaan, meskipun secara empiris ditemukan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat tidak langsung dipengaruhi oleh kemampuan pelaku

pemberdayaan, namun dimediasi oleh suatu proses yang mengiringi pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat bisa diidentifikasi dengan adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan, sehingga diharapkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan dapat meningkatkan kemandiriannya secara berkesinambungan. *Kedua*, pola yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan diperlukan tiga tahapan proses aktifitas yaitu: modal fisik, modal manusia dan proses pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan harus didukung oleh modal fisik (sarana dan prasana) untuk *leverage* pengembangan modal manusia seperti, pendidikan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya sehingga pada gilirannya proses pemberdayaan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2012) yang bertujuan melakukan sintesis berkaitan dengan upaya mendesain sebuah model alternatif proses pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pesisir melalui optimalisasi peran kelompok sebagai basis penguatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji dua program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil. Metode analisis penelitian itu menggunakan regresi berganda, path analysis, analisis model persamaan struktural, dan metode deskriptif (analisis *what-if*). Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada efektifitas peran para pengelola program dan efektifitas fungsi kelompok penerima program, namun juga ditentukan aspek-aspek lain yaitu validitas dan akurasi metode yang digunakan dalam proses seleksi calon penerima bantuan pinjaman dan perencanaan dalam proses pencairan dana yang kurang matang.

*Kedua*, penerima program tidak mampu mendayagunakan bantuan dana secara produktif sehingga kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan. *Ketiga*, berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan bahwa faktor-faktor yang pengaruhnya signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran adalah komitmen pengelola program, tingkat kesesuaian pemberian dana, efektifitas fungsi kelompok penerima, dukungan moral, fluktuasi pendapatan dan hasil kerja pokok sehari-hari. *Keempat*, berdasarkan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* ditemukan bahwa konstruk-*konstruk* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas program pemberdayaan masyarakat adalah faktor internal yang meliputi: kemampuan kerja, pengalaman kerja, karakteristik individual, motivasi kerja, dan kinerja. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan kerja.

Hasil penelitian Pujiyono (2009) tentang optimalisasi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan, menyebutkan bahwa distribusi ZIS masih terdapat salah sasaran (*target error*) sebesar 91,9 persen jika menggunakan kriteria kemiskinan BPS dan target error sebagai sebesar 54,1 persen jika kriteria Bank Dunia. Pujiyono (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa hasil analisis program pemberdayaan melalui modal produktif ternyata variabel modal signifikan dalam mempengaruhi pendapatan penerima program.

## 2. METODE

Pengukuran kemiskinan mengacu pada konsep yang diterapkan BPS, yakni menggunakan model Garis Kemiskinan (GK). Jadi Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Susenas GK periode Maret 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Tabel 1. memperlihatkan pengukuran derajat kemiskinan rumah tangga.

Merujuk data tersebut berarti rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin adalah rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita kurang dari Rp 333.224. Pada 2016, di Provinsi Jawa Tengah populasi penduduk miskin mencapai 4.506.890 jiwa atau setara dengan 13,27 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Sementara pada 2017, seiring dengan kenaikan *poverty line* dari Rp 317.348 menjadi Rp 333.224, justru jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurun, namun tidak signifikan, yakni menjadi sebesar 13,01 persen dari total penduduk Jawa Tengah.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat atau rumah tangga petani di lima (5) desa tertinggal di Kecamatan Weru Sukoharjo. Pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling* yakni pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi masyarakat kategori miskin dan tidak miskin di daerah penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 100 orang, dengan rincian 50 rumah tangga kategori miskin dan 50 rumah tangga kategori tidak miskin, dan setiap desa diambil sebagai sampel sebanyak 20 rumah tangga.

Analisis data penelitian ini menggunakan model regresi logistik *binary* untuk mengetahui determinasi (faktor penyebab) kemiskinan rumah tangga di pedesaan. Model ini diadopsi dari model yang pernah digunakan oleh Bogale dan Shimelis (2009), dan Demeke dan Zeller (2010) pada penelitian tentang determinasi tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Mengingat kerawanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan, maka model tersebut dipandang layak diadopsi dalam penelitian ini.

Variabel dependen dalam model *logistic regression* penelitian ini adalah tingkat kemiskinan rumah tangga dengan skala ordinal (0 - 3), yakni rumah tangga tidak miskin diberi kode 0, rentan miskin diberi kode 1, miskin diberi kode 2, miskin parah diberi kode 3. Sementara variabel independen (penjelas)nya adalah gender kepala rumah tangga (GKRT), pendidikan kepala rumah tangga (PKRT), jumlah anggota rumah tangga (JART), daerah domisili (DD), akses terhadap permodalan (ATP), skill entrepreneur (SE),

system bagi hasil (SBH), kepemilikan luas lahan (KLL), kehadiran teknologi pertanian (KTP) dan pekerjaan utama (PU). Tabel 2 merinci variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) variabel independen, terdapat 2 (dua) variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat kemiskinan, yakni GKRT dan JART (Tabel 3.). Untuk menguji ketepatan model penduga (*goodness of fit*) dilakukan dengan cara melihat nilai *-2 likelihood* (nilai G statistik) dan probabilitasnya. Nilai G statistik diketahui sebesar 6,5648 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Interpretasinya adalah minimal ada satu variabel yang menjadi penyebab tingkat kemiskinan rumah tangga.

Hasil pengujian *goodness of fit* tersebut juga dikuatkan dengan nilai *Nagelkerke (R-square)*. Nilai *Nagelkerke* menginsyaratkan seberapa akurat model regresi logistik ordinal tersebut mengestimasi derajat kemiskinan rumah tangga di daerah penelitian. Nilai *Nagelkerke* ditemukan sebesar 0,7536, interpretasinya adalah variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabilitas variabel independen 75,36 persen, sedangkan sisanya sebesar 24,64 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi ini. Atau kemampuan model memprediksi tingkat kemiskinan rumah tangga sebesar 75,36 persen.

Tahap berikutnya adalah melakukan uji signifikansi parsial terhadap masing-masing variabel independen. Uji tersebut dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi pengaruh (signifikan atau tidak signifikan) variabel penjelas terhadap variabel dependen. Variabel penjelas pertama yang diuji adalah GKRT. Hasil pengujian terhadap gender kepala rumah tangga menunjukkan bahwa GKRT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Hasil ini sejalan dengan temuan Mallick dan Rafi (2010) tentang kerawanan pangan di Bangladesh bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara gender laki-laki

dan perempuan dalam menghadapi kerawanan pangan. Berbeda dengan temuan sebelumnya, Demeske dan Zeller (2010) justru mengasilkan temuan sebaliknya bahwa kepala rumah tangga perempuan cenderung lebih rawan pangan. Namun hasil survei BPS (2017) tentang karekaristik gender mengonfirmasikan bahwa presentase kepala rumah tangga perempuan kategori miskin, tidak jauh berbeda dengan presentase kepala rumah tangga kategori tidak miskin (Tabel 3).

Berikutnya uji signifikansi parsial terhadap PKRT. Pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal itu diindikasikan dengan *p-value* PKRT sebesar 0,000, dan di bawah level signifikansi 5 persen. Interpretasinya adalah semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, maka semakin tinggi pula peluang rumah tangga terhindar dari jeratan kemiskinan. Nilai *odd ratio* PKRT (sekolah menengah) sebesar 1,0876, maknanya kepala rumah tangga yang mengenyam pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) akan memiliki peluang yang besar untuk mencapai derajat tidak miskin, yakni 1,0876 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang hanya bisa menamatkan sekolah dasar. Sementara kepala rumah tangga yang menyandang pendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai status tidak miskin, yaitu 1,1606 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan SD. Hasil tersebut juga didukung data BPS (2017) yang menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan kepala rumah tangga kategori miskin lebih pendek dibandingkan kepala rumah tangga kategori tidak miskin (Tabel 4).

Hasil pengujian signifikansi *wald* terhadap JART menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Hal itu ditandai dengan diterimanya hipotesis nol ( $H_0$ ), yang ditunjukkan dengan *p-value* sebesar 0,767 lebih besar dari level signifikansi yang ditetapkan (5 persen). Hasil pengujian itu tidak searah dengan temuan Demeke dan Zeller (2010) yang

menyimpulkan jumlah anggota keluarga akan menurunkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Demikian juga tidak sejalan dengan hasil riset Nurlatifah et al., (2013) yang menjelaskan bahwa bertambahnya satu orang anggota keluarga, akan mengurangi peluang rumah tangga mencapai katahanan pangan. Namun hasil penelitian didukung hasil pencatatan data BPS (2017) yang mengonfirmasikan jumlah anggota rumah tangga kategori miskin dan tidak miskin tidak berbeda secara signifikan (Tabel 3)

Selanjutnya uji signifikansi parsial terhadap DD. Daerah tempat menetap suatu rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (*p-value* = 0,000). Rumah tangga yang berdomisili di pedesaan lebih sulit mengentaskan dirinya dari status miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang berdomisili di perkotaan. Hal itu ditunjukkan dari hasil pengujian statistik, dimana nilai *odds ratio* 2,591, maknanya peluang rumah tangga di perkotaan untuk melepaskan dari jerat kemiskinan 2,591 kali lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang hidup di pedesaan. Temuan itu logis sebagaimana data BPS (2017) yang mengonfirmasikan adanya ketimpangan angka kemiskinan desa dan kota di Indonesia. Angka kemiskinan desa jauh lebih besar daripada angka kemiskinan kota (Tabel 4).

Hasil signifikansi *wald* terhadap ATP mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa akses terhadap permodalan bagi rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sebagaimana ditandai dengan nilai *p-value* ATP (0,000) lebih kecil dari level signifikansi (0,01) atau signifikan pada  $\alpha$  sebesar 1 persen. Ditemukan juga nilai *odds ratio* sebesar 1,5423 interpretasinya adalah peluang rumah tangga yang memiliki akses ke lembaga keuangan (perbankan atau lembaga keuangan mikro) lebih besar 1,5423 kali untuk mencapai status tidak miskin daripada rumah tangga yang tidak terjamah lembaga keuangan. Hasil uji ini didukung OJK (2017) yang menyatakan perlunya menggalakkan keuangan inklusi, karena masih cukup banyak penduduk Indonesia yang belum terlayani lembaga keuangan, terutama di pedesaan.

**Tabel 5.** Kemiskinan Kota dan Desa

Periode	Kemiskinan (%)	
	Kota	Desa
September 2012	8,62	14,67
September 2013	8,55	14,37
September 2014	8,16	13,76
September 2015	8,22	14,09
September 2016	7,73	13,96

Tabel 5 juga mengisyaratkan adanya pengaruh SE terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Hal itu diperlihatkan dari nilai *p-value* (0,025) lebih kecil dari level signifikansi (5 persen), atau skill entrepreneur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada  $\alpha$  sebesar 5 persen. Nilai *odds ratio* SE sebesar 1,6571 intepretasinya adalah peluang kepala rumah tangga yang memiliki keterampilan wirausaha (petani *agripreneur*) untuk mencapai derajat tidak miskin lebih besar 1,657i kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak memiliki skill kewirausahaan. Sehingga kemampuan mengembangkan hasil usaha tani (tidak hanya menjual langsung ‘produk mentah’ ke tengkulak) bagi rumah tangga di pedesaan menjadi aktivitas kunci untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa sistem bagi hasil (SBH) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Hal itu bisa dicermati dari *p-value* SBH (0,000) lebih kecil dari level signifikansi 5 persen. Atau lebih tepatnya sistem bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada  $\alpha$  sebesar 0,01 (1 persen). Nilai *odds ratio* sebesar 1,8762 menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang lebih adil, dan saling menguntungkan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) memiliki peluang lebih besar yakni 1,8762 kali dalam pementasan kemiskinan ketimbang sistem bagi hasil yang merugikan pihak tertentu, terutama petani penggarap. Hasil pengujian ini juga mengonfirmasikan bahwa perlunya melembagakan sistem bagi hasil (*maro*) yang

telah dipraktikkan petani di pedesaan selama bertahun-tahun, dalam bentuk lembaga keuangan mikro Islam berbasis *local wisdom* (tradisi *maro*). Sehingga lembaga tersebut diharapkan bisa menjamin terselenggaranya system bagi hasil secara adil, dan saling menguntungkan.

Pengujian empiris berikutnya dilakukan pada variabel kepemilikan luas lahan pertanian (KLL). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan luas lahan pertanian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Table 5 memperlihatkan *p-value* KLL (0,000) lebih kecil dari level signifikansi 5 persen, maknanya KLL berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga pada  $\alpha$  sebesar 0,01 (1 persen). Nilai *odds ratio* KLL sebesar 2,3451, rumah tangga yang memiliki lahan pertanian lebih luas (di atas 2 ha) mempunyai kesempatan yang lebih besar, yakni 2,3451 kali dalam meraih status tidak miskin, dibandingkan rumah tangga yang hanya memiliki lahan tanam sebesar kurang dari 2 ha. Hasil penelitian ini didukung hasil sensus pertanian BPS (2013) yang menyatakan bahwa sebagian besar petani Indonesia tergolong petani gurem yang hanya memiliki luas lahan tanam kurang dari 0,5 ha.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sejumlah tabel pendukung dan hasil analisis output yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting. *Pertama*, model regresi logistik ordinal yang digunakan dalam penelitian ini dinilai memenuhi persyaratan sebagai model prediktor yang fit. Hal itu diisyaratkan dengan hasil pengujian *goodness of fit* yang menunjukkan bahwa variabel independen (GKRT, PKRT, JART, DD, ATP, SE, SBH, KLL, KTP dan PU) dapat diandalkan sebagai model estimator bagi variabel dependen (Tingkat Kemiskinan). *Kedua*, Hasil pengolahan regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) variabel independen, terdapat 2 (dua) variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat kemiskinan, yakni GKRT dan JART.



Terdapat sejumlah saran untuk menyempurnakan metode dan hasil penelitian ini. *Pertama*, mungkin perlu dipertimbangkan masuknya keefektifan program pengentasan kemiskinan sebagai variabel penjelas, atau terselenggara dan tidaknya program pengentasan kemiskinan sebuah di desa. *Kedua*, penggunaan model analisis *Structural Equation Modeling* (SEM), mungkin diperlukan untuk mengungkapkan sejumlah variabel yang bersifat *unobserver*. *Ketiga*, variabel-variabel lain di luar model penelitian ini, seperti umur kepala rumah tangga, penerima raskin, pendapatan perkapita, keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap rumah tangga miskin dan sebagainya perlu dimasukkan dalam model untuk menghasilkan output penelitian yang lebih baik. *Keempat*, modifikasi model penelitian dengan mengakomodasi masuknya dimensi kultural dalam model penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan model penelitian yang lebih *predictable*.

## REFERENSI

- [1] Basuno, E., Suhaeti, R.N., Budi, G.S., Iqbal, M. dan Suradisatra, K. (2006), “Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal (Tahap II)”, *Laporan Akhir Penelitian*, PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- [2] Departemen Pertanian (1999). “Ketahanan Pangan dan Kebijaksanaan Operasional Pembangunan Pertanian”. Departemen Pertanian, Jakarta.
- [3] Hasanzadeh A., Meisami H., Shahidinasab M., dan Arani M.A., (2012), “A two-stage approach in Islamic micro-finance: Lessons for Islamic banking system in Iran”. *African Journal of Business Management* .Vol. 6 (18), pp. 5886-5894
- [4] Ilham, N. (2007). “Analisis profil Petani dan Pertanian Indonesia”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- [5] Irawan, B., Simatupang, P., Sugiarto, Supadi, Agustin N.K., Sinuraya, J.F. (2006), “Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- [6] Irianto, G. (2008). “Menyelesaikan Konflik Pangan”. *Opini Republika*. PT Republika Media Mandiri. Jakarta.
- [7] Kamaluddin A., Abdul Hadi N., Alam M.M., Mohamed Adil M.A (2015), “Social Collateral Model For Islamic Microfinance”. *The Journal of Developing Areas*. Volume 49 No. 5.
- [8] Lakollo, E.M., Rusastra, I.W., Saliem H.P., Supriyati, Friyanto, S., dan Budi, G.S. (2007). “Dinamika Sosial Ekonomi Pedesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- [9] Mariyono, J. (2006), “Spatial and Temporal Analysis of Technical Efficiency In Indonesian Rice Agriculture With Two Alternative Model Specifications”. *Jurnal Empirika*, 19 (2): 135-153. BPPE Fakultas Ekonomi UMS. Surakarta.
- [10] Meisami H dan Ali Hasanzadeh A., (2012), “Using Wagf as an Islamic economics institution to present a model of Islamic microcredit compatible with Shia Figh”. *African Journal of Business Management* .Vol. 6 (37), pp. 10109-10116
- [11] Nurmanaf, A.R., Sugiarto, Julin, A., Supadi, Agustin, N.K., Sinuraya, J.F., dan Zakaria A.K. (2005), “Panel Petani Nasional (PATANAS), Dinamika Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masyarakat Pedesaan: Analisis Profitabilitas Usahatani dan Dinamika Harga dan Upah Pertanian”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen, Pertanian. Jakarta.
- [12] Obaidullah M (2015), “Enhancing food security with Islamic microfinance: insights

- from some recent experiments”. *Agricultural Finance Review*. Vol. 75 No. 2, 2015. pp. 142-168.
- [13] Said Ali E.E.A (2015), “Islamic Microfinance: Moving Beyond Financial Inclusion”. *European Scientific Journal*. vol.11, No.10
- [14] Sayaka, B., Ariani M., Siregar M., Supriadi, H., Ariningsih, E., Rahmanto, B., Asikin, A. (2005). “Analisis Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Keanekaragaman Pangan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan”. *Laporan Akhir Penelitian*. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- [15] Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo (2005). “Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog”. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- [16] Sanrego Y.D., dan Antonio M.S., (2013), “The Effect of Social Capital on Loan Repayment Behavior of The Poor (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution)”. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 28, Number 2, 2013, 209 – 231
- [17] Ritonga, R. (2008). “Bukan Sekedar Ketahanan Pangan”. *Opini Republika*. PT Republika Media Mandiri. Jakarta.
- [18] Rusastra I.W., Noekman K.M., Supriyati, Erma, S., Elizabeth, R., dan Suryadi, M., (2005), “Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia”. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- [19] Rachman, Handewi P.S. dan Mewa Ariani (2002), “Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi”. *Forum Penelitian Agronomi*. Volume 20, Nomor 1, Juli 2002, h. 12-24
- [20] Ridwan, M (2009), “Manajemen Baitul Maal wa Tamwil” UII Press. Yogyakarta
- [21] Rosyadi, I (2008). “Penelitian Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Kasus Pada Desa Tertinggal Di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo” Penelitian Reguler LPPM-UMS. Un-Published
- [22] Rosyadi, I. (2009), “Analisis Efisiensi Usahatani Bawang Merah Di Kabupaten Brebes”. Penelitian Reguler LPPM-UMS. Un-Published.
- [23] Tariq Khan M. (2015), “Development of Human Capital Through Institution of Islamic Waqf”. *International Journal of Information, Business and Management*, Vol. 7, No.3, 2015
- [24] Yunus, J.L (2004), “Manajemen Bank Syariah Mikro”. UIN Malang Press. Malang

**LAMPIRAN**

**Tabel 1.** Pengukuran Derajat Kemiskinan Penduduk di Jawa Tengah

Tahun/ Year	Garis Kemiskinan/ Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin/ Number of Poor People	
		Jumlah/ Total (ribu jiwa)	Persentase/ Percentage
Maret 2013	244 161	4 834,95	14,56
Maret 2014	273 056	4 836,45	14,46
Maret 2015	297 851	4 577,04	13,58
Maret 2016	317 348	4 506,89	13,27
Maret 2017	333 224	4 450,72	13,01

Sumber: BPS (2017)

**Tabel 2.** Variabel yang Digunakan dalam Regresi Logistik Ordinal

Variabel	Label	Skala	Kategori	
Dependen	Tingkat kemiskinan RT	Ordinal	0 = tidak miskin	2 = miskin
			1 = rentan miskin	3 = miskin parah
Independen (Penjelas)	Gender kepala RT	Nominal	1 = laki-laki	0 = wanita
	Pendidikan kepala RT	Ordinal	1 = dasar	3 = tinggi
	Jumlah anggota RT	Kontinu		
	Daerah domisili	Nominal	1 = perkotaan	0 = perdesaan
	Akses terhadap permodalan	Nominal	1 = ada akses modal	0 = tidak ada akses modal
	Skill entrepreneur	Nominal	1 = terampil usaha	0 = tidak terampil usaha
	Sistem bagi hasil	Nominal	1 = menguntungkan	0 = tidak menguntungkan
	Kepemilikan luas lahan	Kontinu		
	Kehadiran teknologi pertanian	Nominal	1 = efisien	0 = tidak efisien
	Pekerjaan utama	Nominal	1 = pertanian	0 = lainnya

**Tabel 3.** Hasil Uji Regresi Logistik Variabel GKRT, PKRT, JART, DD, ATP, SE, SBH, KLL, KTP dan PU terhadap Variabel Kemiskinan

Parameter	Koefisien	<i>P-value</i>	<i>Odds Ratio</i>	Uji Model Fit	<i>Nagelkerke</i>
Konstanta	-2,669	0,000*		G = 6,5648	0,7536
(1)	0,504	0,000*		<i>P-Value</i> =	
Konstanta	1,517	0,000*		0,000	
(2)					
Konstanta	0,0001	0,897 <sup>#</sup>	1,002		
(3)					
GKRT	0,0943	0,000*	1,0876		
Laki-laki	0,1342	0,076***	1,1606		
PKRT	-0,1476	0,767 <sup>#</sup>	0,8752		
Menengah					
Tinggi	0,3342	0,000*	2,5961		
JART	0,243	0,000*	1,5423		
DD	0,176	0,025**	1,6751		
Perkotaan	0,221	0,000*	1,8762		
ATP	0,142	0,000*	2,3451		
SE	0,254	0,064***	1,5673		
SBH					
KLL	0,1657	0,000*	0,9576		
KTP					
PU					
Petani					

Keterangan:

\*signifikansi pada  $\alpha = 1\%$

\*\*signifikansi pada  $\alpha = 5\%$

\*\*\*signifikansi pada  $\alpha = 10\%$

<sup>#</sup>tidak signifikan

**Tabel 4.** Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin

Karakteristik RT	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin		
	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017
Rata2 $\Sigma$ ART (jiwa)	4,43	4,49	4,57	3,72	3,71	3,69
KRT wanita (%)	16,94	16,02	16,12	14,38	14,91	15,07
Rata2 lama sekolah KRT (tahun)	5,23	5,27	5,52	7,82	7,82	8,21
Tingkat pendidikan KRT (%)						
- Tidak tamat SD	40,39	37,85	37,44	21,68	20,43	20,05
- SD	35,96	42,95	37,46	28,78	36,81	28,27
- SMP	13,53	7,35	13,52	15,98	9,28	15,86
- SMA	9,54	11,05	10,86	24,57	24,55	26,61
- PT	0,59	0,80	0,73	8,99	8,93	9,21
Sumber utama penghasilan RT (%)						
- Tidak bekerja	13,24	14,59	14,38	11,75	12,77	12,80
- Pertanian	51,18	50,84	49,89	30,77	29,77	29,16
- Industri	5,47	5,31	7,12	8,65	8,42	10,43
- Lainnya	30,11	29,26	28,61	48,80	49,01	47,61

Sumber: BPS (2017)

